

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau

Yonatan¹, Nur Fitriyah²,Antonius Margono³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Pembangunan Jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan Sarana Kesehatan, Pembangunan dibidang Sarana Pendidikan, Pembangunan dibidang Ekonomi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembangunan infra struktur yang dilakukan Pemerintah Keca-matan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jembatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastruktur di beberapa desa di Kecamatan Mentarang, akses-bilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengurbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan dan jembatan di daerah tersebut, tidak ada lagi masyarakat desa yang terisolasi, meskipun pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah kecamatan Mentarang meskipun kurang optimal, tetapi tindakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi (pasar). Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan oleh terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, terbatasnya sumberdaya aparatur yang professional, kurangnya partisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan kurang sinkronnya cairnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur

Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 dan 34 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat mempercepat pembangunan di daerah. Sebab daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meski demikian faktanya tidak selaras dengan yang diharapkan. Justru masih menimbulkan kesenjangan antara harapan dengan

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

kenyataan, yaitu belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Terutama masyarakat yang ada diperbatasan, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Dari hasil pengamatan sementara menunjukkan indikasi masih adanya kesenjangan, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih jauh dari harapan. Seharusnya sudah dua dasa warsa otonomi daerah dilaksanakan keadaan daerah tersebut sudah membawa perubahan yang signifikan, tetapi faktanya keadaan infrastruktur di daerah tersebut masih terjadi ketimpangan padahal pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk percepatan pembangunan daerah.

Pentingnya pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas bidang ekonomi, sosial budaya tetapi juga dapat menunjang kelancaran aktivitas warga dan juga dapat mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Mengingat pembangunan infrastruktur yang dilakukan kurang optimal maka kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan kurang efektif. Mencermati fenomena yang terjadi di objek penelitian maka pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Program Gerbangdema untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut. Program pembangunan dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur, baik dibidang prasarana jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, maupun bidang ekonomi. Diharapkan melalui pembangunan tersebut dapat memperlancar kegiatan masyarakat berbagai hal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam, mengingat pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Malinau belum sepenuhnya menyentuh hati nurani dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap permasalahan yang terjadi sehingga dapat diketahui dengan jelas mengenai problem statement yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle (dalam Solichin, 1997 : 125) "*implementation as process politic and administration*" (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Pandangan Grindle ini setidaknya-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (*enviroment*). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/ biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe

manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumberdaya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasinya terdiri atas : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) keputusan dan daya tanggap. Di luar isi kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program aksi dan proyek individu dan dibiayai, program yang dijalankan seperti yang direncanakan, mengukur hasil kebijakan, yang kesemuanya saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari suatu kebijakan.

Meter dan Horn (1978;263) bahwa ; *Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions*. Definisi tersebut memberi memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, tetapi lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dengan demikian fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut "*Policy Delivery System*" (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negam serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan suatu indikasi bahwa perencanaan dan kesadaran pelaksana pembangunan sangat menentukan.

Menurut perkembangan ilmu pengetahuan, tentang konsep pembangunan ternyata telah mengalami perkembangan yang berarti didalam memecahkan masalah. Dalam konsep pembangunan.sebuah negara dapat mengacu pada suatu paradigma yaitu paradigma yang berorientasi pada pertumbuhan (*Growth*), dan kesejahteraan (*Welfare state*). Tetapi ada pula paradigma yang berorientasi pada neo ekonomi dan humanizing. Masing-

masing paradigma tersebut memiliki perbedaan dan hal tersebut tergantung pada titik berat atau orientasinya.

Berdasarkan perkembangan paradigma pembangunan tersebut, terdapat dua premis yaitu kegagalan dan harapan terhadap model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ditawarkan oleh beberapa pakar ekonomi. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada model pertumbuhan yang lebih mengarah pada *trickle down effect*. Yaitu efek menetes ke bawah (Benyamin, 1959) dalam Suprpto, (2000:77). Paradigma ini memandang bahwa kekuatan ekonomi telah banyak memperdaya kekuatan masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan ukuran *Gross National Product* (GNP) yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya yang telah menyuplai angka pendapatan kepada masyarakat miskin. Adapun masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi tidak memberikan pendapatan riil tersebut kepada masyarakat miskin. Tetapi mereka hanya menyuplai angka sehingga efek nilai dan GNP yang tinggi tidak menetes pada masyarakat yang miskin.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan social ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.

Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat perlakuan yang diskriminatif seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Malinau terutama pada daerah perbatasan masih jauh dari harapan. Sebagai daerah yang baru dimekarkan sudah sepantasnya mendapat perhatian yang lebih besar agar aksesibilitas berbagai kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Disisi lain dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dapat memperlancar tugas-tugas pemerintah, dan pelayanan umum. Sebagaimana yang dikemukakan Tegoro, (dalam Surjono, 2004 : 93) bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terlebih dahulu perlu dipersiapkan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan tranformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan kecamatan bahkan kemudahan akses menuju Ibukota Kabupaten. Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam

kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan akselerasi pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai. Tentunya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi pemerintahan, baik lembaga pemrintah pada level yang paling bawah hingga lembaga pemerintah paling atas. Hendaknya dilakukan secara terpadu tertib, aman, nyaman dan lancer sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar pada masyarakat.

Pelayanan Publik

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun Kotler (1995 :548). Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Moekiyat, (1990 : 83). pelayanan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga publik untuk melayani kepentingan publik (barang & jasa) hingga diperolehnya layanan yang baik

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2001: 98) pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan per-undang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dan demokratis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa yang disediakan oleh penyelenggara, baik melalui perorangan maupun kelembagaan. Sebagai institusi pemerintah bahwa pelayanan publik sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Analisis Data

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan penulis adalah model Alir yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2004 :16) melalui tahapan-tahapan yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data /menerik kesimpulan

Hasil Penelitian

Sesuai data yang dikemukakan diatas memperlihatkan mengindikasikan bahwa pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupeten Malinau dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup ekonomi dan sosial sangat dibutuhkan, yang dalam proses perkembangan

kehidupan manusia. Dalam sudut pandang ini, sistem infrastruktur merupakan utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau selalu menjadi prioritas agenda pembangunan daerah, mengingat keberadaan infrastruktur yang ada sekarang ini ada dengan tingkat kebutuhan yang seharusnya tersedia dirasakan sangat kurang. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang cukup akan mendukung denyut nadi kehidupan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tujuan pembangunan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau, salah satunya adalah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di pedesaan maupun di perkotaan. Untuk membangun dan memelihara infrastruktur pedesaan dan perkotaan, pemerintah daerah mengambil beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Pembangunan Infrastruktur Penunjang
- b. Pembangunan Prasarana Pengairan dan infrastuktur air bersih
- c. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
- d. Pembangunan Infrastruktur pemukiman, baik di pedesaan maupun di perkotaan

Arah kebijakan strategis tersebut merupakan sinergisasi dari Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri yang mengarahkan pembangunan dilaksanakan dengan sinergis dan partisipatif dengan memfungsikan segala sumber daya yang ada. Dari hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dapat dibahas dalam uraian berikut ini:

Pembangunan prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur bidang transportasi di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau meliputi pembuatan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pembangunan dermaga pelabuhan. Namun dari ketiga jenis pembangunan tersebut, hanya dermaga yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah demikian juga dalam program Gerbangdema. Tidak masuknya rencana pembangunan dermaga karena telah ada dermaga di Kecamatan Long Pahangai yang cukup representatif dibangun pada tahun 2004. Sedangkan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana di uraian pada data hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat dan tingkat kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau telah membawa perubahan yang berarti untuk menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat. Perubahan tersebut bukan hanya pada aspek prasarana jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan tetapi juga pada bidang ekonomi. Meskipun perubahan tersebut belum sesuai harapan warga masyarakat tetapi dengan dibangunnya beberapa aspek prasarana tersebut, tercipta suasana dan lingkungan masyarakat nampak lebih baik.

Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting pembangunan secara keseluruhan. Sarana jalan akan membuka aksesibilitas wilayah, mendukung roda perekonomian masyarakat dan secara luas akan memperlancar arus manusia, barang dan jasa sehingga terjadi perubahan sosial ekonomi di suatu daerah disebabkan karena adanya infrastruktur jalan yang mendukung. Untuk itu maka ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan masuk dalam agenda pembangunan fisik Pemerintah kabupaten Kutai Barat dan secara sungguh-sungguh akan diupayakan pembiayaannya dari dana APBD maupun dari APBN.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau pada tahun 2010-2015 dalam RKPD pembangunan jalan di Wilayah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disusun berdasarkan skala prioritas dengan pertimbangan tingkat kebutuhan, kondisi wilayah dan sumber dana. Oleh karena itu tidak semua usulan dari warga masyarakat dipenuhi. Walaupun hanya sebagian dari usulan pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada rencana pembangunan tahun 2010-2015, warga masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam proses implementasi pembangunan infrastruktur dilaksanakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini oleh Dinas PU Kabupaten Malinau. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dalam penelitian di peroleh informasi bahwa Dinas PU selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, selanjutnya pemerintah desa berkonsultasi dengan warga masyarakat sehingga pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan di desa melibatkan warga masyarakat sebagai tenaga kerja, meskipun berbagai proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menggunakan sistem tender dan kontraktor sebagai pelaksana di lapangan.

Dari hasil penelitian, beberapa kendala dalam implementasi pembangunan prasarana jalan dan jembatan ini umumnya adalah mengenai masalah waktu. Dari penjelasan pihak kontraktor, seringkali terjadi keterlambatan ini diakibatkan karena faktor cuaca, belum ada surat pelaksana pekerjaan, dana stimultan dari pemerintah belum turun. Hal ini untuk masa mendatang sebaiknya dapat dihindari, terutama mengenai turunnya dana dari pemerintah.

Dari hasil temuan diperoleh informasi bahwa pembangunan prasarana jembatan ternyata pemerintah Kecamatan Mentarang dapat menambah 2 (dua) unit jembatan yaitu di desa Sungai Terang dan Lindung Keminci. Untuk keperluan tersebut pemerintah Kabupaten Malinau telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 17.988.613.750,- yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembangunan prasarana jalan dan jembatan tersebut merupakan manifestasi dari Program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dalam rangka kelancaran pelayanan pada masyarakat. Ini berarti

pembangunan prasarana jalan dan jembatan, dapat mempermudah akses dalam segala kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat

Pembangunan Prasarana Kesehatan

Salah satu indikator sejahtera adalah pencapaian derajat kesehatan manusia mampu melaksanakan kegiatan keseharian dengan baik. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, maka perlu diupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, bermutu dan murah. Bahkan saat ini dengan adanya program Jaskemas, seluruh masyarakat diberi jaminan untuk mendapatkan kesehatan di pusat pelayanan masyarakat seperti di Puskesmas, Rumah Sakit Umum, atau Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk. Sehubungan dengan program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu terus diupayakan pembangunan unit pelayanan kesehatan baru yang didukung dengan fasilitas yang memadai serta tenaga media dan perawat kesehatan yang kompeten. Untuk itu maka pembangunan infrastruktur bidang kesehatan khususnya di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau menjadi sangat penting untuk dibangun. Dari hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, sebagaimana pada sub bab penyajian data hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, kemudian masuk dalam Program Gerbangdema tahun 2010-2015.

Pembangunan infrastruktur bidang kesehatan dalam program Gerbangdayaku bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan oleh unit pelayanan kesehatan di daerah. Oleh karena itu maka pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau antara lain adalah melengkapi fasilitas kesehatan termasuk dokter dan membangun puskesmas pembantu di desa-desa. Pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau merupakan proyek dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang berasal dari usulan masyarakat Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dan pertimbangan tingkat kebutuhan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Proses pembangunan gedung rawat inap di Puskesmas Kecamatan Mentarang, penambahan peralatan medis, serta pembangunan rumah dokter, pengadaan mobil ambulance diserahkan kepada pihak kontraktor dengan sistem tender sedangkan proyek pembangunan puskesmas pembantu di Desa Pulau Sapi oleh masyarakat lewat LPM Kampung Long Isun. Ini berarti masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan meskipun sebatas menjadi tenaga kerja. Koordinasi dalam implementasi juga nampak diantara para pelaku pembangunan yaitu antara Dinas Kesehatan Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak ketiga (pemborong) dan warga masyarakat. Adanya koordinasi yang baik ini diakui dapat menyatukan,

menyelaraskan arah kegiatan pembangunan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Sedangkan dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa tidak semua usulan pembangunan bidang kesehatan dapat terealisasi. Penyeleksian program dan usulan sesuai dengan skala prioritas serta keterbatasan dana diakui menjadi salah satu sebab implementasi pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Kemudian ditinjau dari pembangunan prasarana Kesehatan. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan prasarana kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mentarang mampu membawa perubahan dan perbaikan dibidang kesehatan. Terindikasi oleh bertambahnya fasilitas kesehatan seperti Pembangunan Pustu Rajuk, Pembangunan Pustu Harapan Maju, Rehab Puskesmas Mentarang Baru, memakan biaya sebesar Rp. 1.679.096.000,- yang berasal dari APBD.

Pembangunan Prasarana Bidang Pendidikan

Pembangunan infrastruktur bidang pendidikan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dapat diimplementasikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. RKPD ini berasal dari usulan dari masing-masing Kecamatan (Pemerintah Kecamatan dan Kepala Sekolah) dan Dinas Pendidikan Kabupaten sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah sesuai dengan aspirasi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di kecamatan Long Pahangai merupakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan bertujuan mengupayakan agar pada peserta didik di wilayah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Didukung juga dengan upaya penambahan tenaga guru, baik yang berstatus PNS maupun Honorer karena tanpa dukungan tenaga pendidik, maka akan menghambat proses belajar mengajar. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bidang pendidikan yang dilakukan di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dapat dikatakan hampir tidak ada. Keterlibatan yang ada hanya sebagai tenaga kerja saja. Namun demikian dalam kerangka pembangunan dari, untuk dan oleh rakyat, secara tidak langsung warga masyarakat ikut menjaga keberadaan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.. Selain itu dari hasil penelitian menjelaskan adanya koordinasi yang baik diantara pemerintah Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Koordinasi ini dimulai dari tahap perencanaan, implementasi dan pengawasan proyek pembangunan.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak kontraktor pembangunan atau pengadaan perlengkapan sekolah.

Ditinjau dari sisi pendanaan pembangunan, program Gerbang-dema memprogramkan kucuran dana pembangunan sebesar 12 milyar untuk masing-masing kecamatan. Namun demikian dalam implemen-tasinya bukan berarti pemerintah Kecamatan mendapatkan dana tersebut secara cash atau tunai. Menurut nara sumber di Kecamatan, bahwa dana tersebut tidak berupa uang saja namun berwujud pembangunan atau program lainnya baik yang datang dari pemerintah kabupaten ataupun yang dikelola pemerintah kecamatan dan jika dihitung tiap tahunnya mendekati jumlah tersebut. Sedangkan mengenai manfaat dari pembangunan infrastruktur pendidikan secara langsung dirasakan oleh pihak sekolah sendiri dan secara tidak langsung dirasakan oleh para siswa, dan orang tua sehubungan dengan program sekolah gratis.

Pembangunan Infrasturktur Bidang Ekonomi

Pembangunan infratraktur ekonomi selalu mendapat penekanan dari pemerintah di samping infrastruktur lainnya. Oleh karena ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi ini erat kaitannya dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun jalan, jembatan, berhubungan sarana ekonomi masyarakat umum yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pasar atau untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa pembangunan prasarana ekonomi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Mentarang belum teralisasi, meski demikian sudah mendapat titik terang sebab pemerintah telah menyetujui usulan pembangunan pasar tradisional yang akan dilakukan di Desa Pulau Sapi dan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Pembangunan infrastruktur pasar di Kecamatan Mentarang Kabupeten Malinau dari hasil penelitian terdiri dari pembangunan pasar baru di desa-desa yang belum mempunyai pasar dan perluasan atau penambahan fasilitas pasar di Kecamatan Mentarang Kabupeten Malinau. Adapun realisasi dari kebijakan ini dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas pasar. Demikian juga dengan pembangunan gedung untuk Koperasi Unit Desa dalam melayani keperluan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infratraktur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program Gerbangdema di Kecamatan Mentarang Kabupeten Malinau masih dalam tahap perencanaan.

Dari keseluruhan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya di lakukan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan lingkup bidang perangkat daerah, dengan dana berasal dari APBD tiap tahun anggaran dan pembangunannya dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Koordinasi berjalan dengan cukup baik , baik dari pemerintah kabupaten (dinas-dinas terkait),

pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa beserta pelaksana teknis proyek. Tingkat partisipasi masyarakat nampak pada proyek-proyek berskala kecil. Dengan dukungan seluruh warga dan perangkat pemerintah daerah yang ada, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Meskipun dalam proses dihadapkan oleh persoalan, misalnya keterlambatan dalam pendanaan tetapi dapat teratasi.

Faktor-faktor yang Mendukung meliputi :

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
- c. Komitmen Camat dan pimpinan vertikal pemerintahan Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur
- d. Dukungan seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mentarang

Faktor-faktor yang Menghambat meliputi :

- a. Pendanaan yang sering terlambat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak sesuai rencana kerja
- b. Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
- c. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh para kontraktor dan rendahnya aksesibilitas transportasi
- d. Terisolirnya lokasi pembangunan, dan rendahnya aksesibilitas transportasi untuk ke objek pembangunan

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, pertama pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan pembangunan Desa Mandiri telah mengalami perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Perubahan terjadi bukan hanya bidang prasarana jalan dan jembatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi. Dengan dibangunnya infrastruktur di beberapa desa di Kecamatan Mentarang, aksesibilitas kehidupan masyarakat lebih lancar, aman dan terjangkau, disamping tidak dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi, kedua pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau mempunyai nilai manfaat lebih besar terhadap kehidupan masyarakat walaupun belum semuanya sesuai yang diharapkan masyarakat, tetapi hasil pembangunan yang dilakukan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti sarana dan prasarana pendidikan, prasarana jalan dan jembatan, sarana dan prasarana kesehatan serta prasarana ekonomi (pasar), dan terakhir kurang optimalnya

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan selain terbatasnya alokasi sumber dana per sub kegiatan, juga terbatasnya sumber daya aparatur yang professional. Disamping itu kurangnya partisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah kecamatan dalam rangka percepatan pembangunan dan kurang sinkronnya antara cairnya pendanaan dengan rencana kerja sehingga pembangunan prasarana jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kurang efektif atau tidak tepat waktu.

Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran, sebagai berikut : pertama, meningkatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai skala prioritas. Kedua, menyelaraskan pencairan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan rencana kerja. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan melakukan mitra kerja pada masyarakat. Terakhir membangun kerjasama yang lebih intens, antar warga penduduk, antar instansi pemerintah disekitarnya serta melakukan pendekatan dengan pimpinan instansi vertikal, pemerintahan Kabupaten Malinau.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-undang Nomor. 32 dan 33 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Indonesia. Jakarta.
- _____, 2013. Gerbangdema Sebagai Model Pembangunan Kabupaten Malinau. Bappeda Kabupaten Malinau.
- Abdul Wahab, Solichin,. 2003. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making* Holt. Rinehart and Winston. New York.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Texas A dan M University, Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementations in the third World*. Princeton University Press
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Kaho. Josef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Rajawali Press. Jakarta.
- Lineberry, Robert H. 1978. *American Public Policy*. North Western University Harper And Row. Publisher, New York.
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier (eds), 1981. *Effectively Policy Implementation*. Lexington Mass.

- Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Beverly Hills, Sage Publication inc
- Milles B, Mathew dan A.Michaell Huberman. 2005. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta.
- Nugroha, Riant. 2005. *Analisis Kebijakan Publuk*. Edisi 3, Gramedia. Jalarta.
- Siagian, SP. 1998. Administrasi Pembangunan, Cetakan kesebelas, Gunung Agung, Jakarta.
- Soekartawi, 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah. Rajawali. Jakarta.
- Todaro, M. P. 1992. *Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga*. Terjemahan dari: Haris M. Erlangga, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1995. Good Governance; Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume II No.1 FIA. UNBRAW. Malang.
- Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, 1975. The Policy Implementation Process: Conceptual Framework. USA. Administration and Society.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.